

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ag Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Bagir Manaan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1993.

C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintah Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1955.

HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta; Perpustakaan Nasional Indonesia, 2003.

-----, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraann Mahkamah Konstitusi, 2008.

-----, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

M Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta;Totalmedia, 2013.

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Yusnani Hasyimzoen, dkk, *Hukum Pemerintah Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Yusuf Qardahwi, *Mumbumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Al-Qur'an bagi Peserta Didik dan Madrasah Ibtidaiyah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz Al-qur'an.

C. Internet

Heru Permana Putra dan Desi Syafriani, 2019, "Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah di Kota Padang" *Jurnal Islam Transformatif*. Vol.03 No. 02

Budi S.P Nababan, 2018, "Legalitas Perda Zakat Perspektif Teori Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 4

Sopyan Mei Utama, 2018, "Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Ejurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No 01

Dahlia Haliah Ma'u, 2017, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 15 No.01

Cholida Hanum, 2017, "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 7 No. 1

Ali Sodikim, 2012, "Positififikasi Hukum Islam di Indonesia Prospek dan Problematikanya". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 02

Aulia Rahmat, 2012, "Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau melalui Kebijakan Desentralisasi." *El-Harakah*. Vol. 1 No 01

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/157-peraturan-daerah-yang-bernuansa-syariat-islam.html> diakses pada 16 Januari 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf79a82958d5/eksistensi-peraturan-daerah-syariah-di-indonesia> diakses pada 24 Januari 2020

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pemkot-padang-gencarkan-wajib-baca-alquran> diakses pada 18 Mei 2020

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/02/nkklyd-kualitas-baca-alquran-pemuda-padang-memprihatinkan> diakses pada 19 Juli 2020

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah> diakses pada 20 Juli 2020

